

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Dalam menyusun penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa literatur dan tinjauan pustaka sebagai acuan teoritis serta perbandingan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tinjauan pustaka ini mencakup konsep dasar sistem informasi, konsep keterbukaan informasi publik, serta kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan. Sistem informasi dalam organisasi pemerintahan dapat dipahami sebagai suatu kesatuan komponen yang saling terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bernilai guna. Pemanfaatan sistem informasi memungkinkan proses kerja yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat ditransformasikan menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikendalikan.[8]. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam konteks pemerintahan, sistem informasi berperan vital untuk mentransformasi proses manual menjadi digital guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi layanan.

Dalam konteks keterbukaan informasi publik, PPID berperan sebagai unit yang mengoordinasikan pengelolaan informasi dari berbagai instansi agar dapat disajikan secara akurat dan tepat waktu. Pada Pemerintah Kota Tegal, kompleksitas tugas PPID meningkat seiring dengan jumlah OPD yang terlibat, sehingga diperlukan dukungan sistem informasi terintegrasi.[1]. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Fungsi utama PPID adalah melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang meliputi proses pengumpulan,

penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi[4]. Sedangkan Sistem informasi yang dikembangkan merupakan solusi digital terintegrasi yang dirancang untuk mengoptimalkan koordinasi data di lingkungan Pemerintah Kota Tegal melalui portal khusus bagi 73 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Melalui sistem ini, operator OPD dapat mengunggah dokumen publik secara mandiri, yang selanjutnya akan melewati alur verifikasi dan validasi oleh Admin PPID guna memastikan kelengkapan data sebelum disetujui. Seluruh dokumen tersebut disimpan dalam sebuah arsip digital terpusat berbasis database untuk menjamin keamanan informasi dan mempermudah pencarian kembali data di masa mendatang. Selain itu, sistem menyediakan fitur dashboard monitoring secara real-time yang menampilkan statistik kepatuhan penyerahan dokumen bagi pimpinan, sekaligus mendukung implementasi konsep e-government yang transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan, platform ini mempermudah petugas dalam menghasilkan laporan rekapitulasi penyerahan informasi publik secara otomatis dengan data yang lebih akurat.

Adapun tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan sekumpulan komponen yang saling terintegrasi untuk mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat. Informasi yang dihasilkan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, pengelolaan data, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Keberadaan sistem informasi membantu proses kerja berjalan lebih tertata dan efisien[8].

b. Sistem Informasi dalam Pemerintahan

Sistem informasi pemerintahan berfungsi sebagai sarana pendukung dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik. Pemanfaatan sistem informasi dalam lingkungan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja, akurasi data, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel[8].

c. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik. Informasi publik mencakup informasi yang dikelola dan dihasilkan oleh badan publik terkait penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini mendorong transparansi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah[1].

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelayanan informasi publik. PPID berperan dalam mengoordinasikan pendokumentasian, penyimpanan, serta penyediaan informasi agar dapat diakses oleh masyarakat secara tertib dan sesuai ketentuan[4].

e. Model Pengembangan Sistem Waterfall

Model Waterfall merupakan metode pengembangan sistem yang dilakukan secara bertahap dan berurutan. Setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Model ini memudahkan pengelolaan proses pengembangan sistem karena alurnya jelas dan terdokumentasi[5].

f. Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk menggambarkan kebutuhan dan struktur sistem perangkat lunak. UML membantu dalam memvisualisasikan alur proses, peran pengguna, serta hubungan antar komponen sistem sehingga mudah dipahami sebelum sistem dikembangkan[7].

2.2. Penelitian Terkait

Untuk menghindari duplikasi dan memastikan kebaruan (novelty) penelitian, penulis melakukan peninjauan terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan topik pengelolaan informasi, arsip digital, dan sistem PPID. Penelitian pertama dilakukan oleh Ega Hapira (2022)[9]. Penelitian ini berfokus pada pembuatan portal front-end agar masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara online tanpa harus datang ke kantor. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini terletak pada fokus layanannya, di mana penelitian Hapira menitikberatkan pada layanan eksternal (masyarakat ke PPID), sementara penelitian ini lebih berfokus pada tata kelola internal (OPD ke PPID) dan manajemen arsip sebelum dipublikasikan.

Selanjutnya, Esa Nugraha F. Pujiady, dkk. (2025)[10]. Penelitian tersebut berhasil membangun sistem pengarsipan surat masuk dan surat keluar secara digital untuk mengurangi penggunaan kertas dan risiko kehilangan dokumen. Perbedaan utama dengan penelitian saat ini adalah studi kasusnya yang berada pada Dinas Kependudukan, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada alur kerja pengumpulan dokumen publik dari 73 OPD yang memiliki karakteristik pelaporan khusus.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ananda Shavira, dkk. (2021)[3]. Hasil penelitian ini berupa sistem dashboard untuk memonitoring kinerja instansi pemerintah berdasarkan laporan yang dikirimkan secara berkala. Persamaan dengan penelitian yang diusulkan terletak pada fitur monitoring, namun penelitian saat ini mengintegrasikan monitoring tersebut dengan manajemen dokumen publik sesuai standar UU KIP, bukan sekadar laporan kinerja.

Penelitian terkait lainnya dilakukan oleh Dahri & Setya Hadi (2023)[11]. Penelitian ini menghasilkan sistem kearsipan lokal yang memudahkan pengelolaan arsip di lingkungan Kejaksaan Negeri Padang. Perbedaan signifikan terletak pada objek arsipnya, di mana penelitian Dahri berfokus pada arsip data kasus hukum di kejaksaan, sedangkan penelitian ini berfokus pada manajemen informasi publik yang diatur dalam UU KIP. Kemudian, Wulandari, dkk. (2023)[12]. membahas tentang bantuan proses pengarsipan dokumen pertanahan dalam bentuk digital guna mencegah kerusakan fisik data. Meskipun memiliki kesamaan dalam hal digitalisasi arsip, penelitian tersebut menggunakan platform web responsif khusus untuk dokumen pertanahan, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada fungsi monitoring kepatuhan OPD dalam menyerahkan dokumen.

Penelitian terkait selanjutnya dilakukan oleh Lestari & Prabowo (2024) [13]. Penelitian ini menghasilkan sistem informasi PPID berbasis website pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II yang memfasilitasi keterbukaan informasi di instansi hukum. Persamaannya adalah penggunaan teknologi web untuk mengelola dokumen publik secara terpusat, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus integrasi layanan dari 73 OPD yang memiliki kompleksitas

rekapitulasi data lebih tinggi. Kemudian, Arrofi (2025)[14] mengkaji implementasi website PPID di Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Meskipun memiliki kesamaan dalam subjek PPID dan tujuan transparansi, penelitian saat ini lebih menekankan pada otomatisasi alur kerja internal pengumpulan dokumen dari banyak instansi ke PPID Utama.

Selanjutnya, Journal Publicuho (2025) membahas tentang pengelolaan electronic government melalui E-PPID dalam mendukung tata kelola informasi publik di Bawaslu DIY[15]. Persamaannya adalah pengembangan fitur permohonan informasi publik secara online, namun penelitian ini dikembangkan khusus dengan penambahan fitur monitoring real-time untuk memantau status kepatuhan OPD secara akurat. Terakhir, penelitian oleh Fadila dkk. (2024)[16] berfokus pada perancangan prototype user interface sistem informasi pusat data dokumen menggunakan Figma. Kesamaan terletak pada tahap perancangan UI/UX menggunakan Figma, sedangkan penelitian ini melangkah lebih jauh hingga tahap implementasi sistem informasi yang terintegrasi dengan basis data untuk operasional harian PPID Kota Tegal.

Terakhir, penelitian oleh Maylina Olivia, dkk. (2024)[17]. bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keterbacaan informasi pengelolaan arsip dokumen menggunakan pemodelan diagram UML. Perbedaan dengan penelitian yang dikerjakan saat ini adalah fokus kearsipannya yang diperuntukkan bagi operasional Search and Rescue (SAR), sementara penelitian ini dirancang untuk tata kelola dokumentasi publik pemerintahan di tingkat kota. Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masih

terbatas penelitian yang secara spesifik membahas sistem informasi untuk mengelola alur kerja internal pengumpulan dokumen dari banyak OPD ke PPID Utama, sehingga penelitian ini memiliki kebaruan dari sisi fokus dan ruang lingkup pengelolaan informasi.